



Optimalisasi Fungsi BUMdes Melalui Penguatan Manajemen dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa Wisata Ngargogondo Borobudur

Lucia Rita Indrawati¹, Ghina Fitri Ariesta Susilo*¹,
Suci Nasehati Sunaningsih¹, Alkadri Kusaleandra Siharis¹,
Chaidir Iswanaji¹

¹Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Article Information

Submitted Oktober 14, 2021

Revised Desember 16, 2021

Accepted Desember 18, 2021

Published Desember 30, 2021

Abstract

Ngargogondo Village is one of the tourist villages located in the Menoreh Mountains range 3 kilometers southeast of the Borobudur Temple Tourism Object. Based on its geographical location, Ngargogondo Village has the potential as a tourist village that can improve the residents' economy. Based on the results of initial observations in the Ngargogondo Village area, the biggest problem faced is the lack of synergy between the village government, village communities, business actors, and BUMDes in order to develop the village's economic potential. This is due to the lack of awareness and motivation of BUMDes managers, Weak management of BUMDes management, BUMDes business activities are not innovative and tend to be passive. develop village potential. PKM activities are carried out in Ngargogondo village using various implementation methods, including observation, lectures and discussions, direct practice, supervision and evaluation. how to design a good Business Plan, including how to calculate the cost of production and efficient production in generating profits for BUMDes. recommendations for further PKM activities can be held seminars and training on promotional techniques so that the BUMDes of Ngargogondo Village can develop rapidly.

Keywords: Management; Tourism Village; BUMDes.

Desa Ngargogondo adalah salah satu desa wisata yang terletak di barisan Pegunungan Menoreh 3 kilometer arah tenggara Objek Wisata Candi Borobudur. Berdasarkan letak geografis, Desa Ngargogondo memiliki potensi sebagai desa wisata yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Berdasarkan hasil observasi awal di wilayah desa Ngargogondo, permasalahan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya sinergitas antara pemerintah desa, masyarakat desa, pelaku usaha, dan BUMDes dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan motivasi pengelola BUMDes, Lemahnya manajemen pengelolaan BUMDes, menyebabkan kegiatan usaha BUMDes tidak inovatif dan cenderung pasif, untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk seminar, pelatihan dan pendampingan untuk membekali warga masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Kegiatan PKM dilakukan di Desa Ngargogondo dengan menggunakan berbagai metode pelaksanaan, diantaranya observasi, ceramah dan diskusi, praktik langsung, pengawasan dan evaluasi, Hasil dari PKM ini adalah peningkatan pengetahuan peserta PKM tentang pembukuan akuntansi dan penyusunan SOP, peserta juga telah memiliki pengetahuan tentang Inovasi dan bagaimana cara merancang business plan yang baik, mencakup cara menghitung harga pokok produksi dan produksi yang efisien dalam menghasilkan keuntungan bagi BUMDes. rekomendasi untuk kegiatan PKM selanjutnya dapat diadakan seminar dan pelatihan mengenai teknik promosi sehingga BUMDes Desa Ngargogondo dapat berkembang pesat.

Kata Kunci: Manajemen; Desa Wisata; BUMDes.

*Korespondensi Penulis: Ghina Fitri Ariesta Susilo, email: ghinafitri.ariesta@untidar.ac.id, Alamat Korespondensi penulis, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia.

Copyright © 2021 Lucia Rita Indrawati, Ghina Fitri Ariesta Susilo, Suci Nasehati Sunaningsih, Alkadri Kusaleandra Siharis, Chaidir Iswanaji

Pendahuluan

Pemerintah menetapkan 10 (sepuluh) Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, yang salah satunya berada di Jawa Tengah yaitu kawasan Borobudur dan desa-desa di sekitarnya yang ditetapkan sebagai desa wisata. Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus seperti sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal (Masitah, 2019).

Perkembangan desa wisata Indonesia dimulai pada tahun 2007 ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program Visit Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan pariwisata. Pada tahun 2011, jumlah desa yang telah berkembang menjadi desa wisata adalah 569, meningkat menjadi 978 pada tahun 2012 dan 980 pada tahun 2013. Tujuan pengembangan desa wisata adalah untuk menciptakan masyarakat yang memahami dan mengenal potensi pariwisata di lingkungannya sendiri sehingga tercipta objek wisata yang kreatif. Secara umum desa wisata memiliki beberapa kendala dan tantangan, antara lain keterbatasan pandangan atau gagasan yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya minat dan kesadaran masyarakat, rendahnya bakat, kendala budaya, seringkali paksaan dan penipuan wisatawan. Namun perkembangan desa wisata sangat dipengaruhi tidak hanya oleh sarana dan prasarana wisata, tetapi juga oleh aspek kelembagaan barang dan daya tarik wisata. Hal ini dikarenakan ketiga aspek pembangunan desa wisata memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan produk wisata (Dhesinta Rini & Tarigan, 2020).

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu upaya untuk menghadapi perkembangan ekonomi pedesaan yang relatif lambat dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara optimal (Suwito & Yusuf 2020). Pemanfaatan potensi ekonomi desa wisata yang optimal dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa (Vibriyanti, 2020). BUMDes diharapkan dapat mewujudkan pemerintah desa yang mandiri, apalagi dengan adanya krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 yang membuat roda perputaran keuangan masyarakat mengalami kemacetan (Aniyah, 2020).

Secara umum pengertian kelembagaan mencakup konsep pola-pola perilaku sosial yang berakar terus menerus atau berulang-ulang dan berulang-ulang. Ada dua aspek penting dari aspek kelembagaan: aspek kelembagaan dan aspek organisasi. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial, dan fokus penelitiannya adalah pada nilai, norma, keyakinan, gagasan, ajaran, keinginan, kebutuhan, arahan, dan lainnya. Aspek organisasi meliputi struktur atau struktur sosial, tetapi inti dari mata kuliah tersebut adalah aspek peran. Aspek struktural juga mencakup peran, kegiatan, hubungan peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan teks dan struktur faktual, struktur otoritas atau kekuasaan, hubungan antara kegiatan dan tujuan yang dicapai, aspek solidaritas, profil dan pola kekuasaan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan desa

menuju desa wisata, persoalan sistem desa merupakan kriteria terpenting dalam mengembangkan desa wisata yang menjaga kearifan lokal. Idealnya, mengelola desa dengan sistem yang mencerminkan prinsip pengelolaan yang baik akan berdampak positif bagi kemandirian melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyatakan bahwa “penghasilan desa asal terdiri atas prestasi, hasil harta benda, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lain dari desa asal”. Penjelasan undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa capaian yang disebutkan dalam pendapatan asli desa berasal dari hasil bakaran dan tanah bengkok. Pedoman pengelolaan unit usaha di 4.444 desa (Bumdes) tersebut pada akhirnya bertujuan untuk berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Bumdes meningkatkan upaya masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat harta benda, mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama usaha antara desa dengan pihak ketiga, dan peluang. menciptakan jaringan pasar dan menciptakan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan (Wibisono, 2020).

Pembentukan Bumdes harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan berfungsi sebagai upaya untuk memecahkan masalah ekonomi desa. Pendirian Bumdes harus dilihat sebagai strategi jitu dalam mengelola kekayaan desa. Gagasan pembentukan harus diorganisir melalui mekanisme musyawarah desa, forum demokrasi yang mempertemukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan kelompok masyarakat. Aksi unjuk rasa sendiri merupakan undang-undang desa yang bersifat wajib yang

bertujuan untuk melembagakan demokrasi lokal dengan membahas isu-isu strategis, termasuk pembentukan Bandes. Selain mekanisme musyawarah desa, Bumdes ini harus memiliki inventarisasi aset. Oleh karena itu, pendirian Bumdes pada dasarnya berarti membangun tradisi demokrasi di desa untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi di masyarakat desa. Forum permusyawaratan desa yang didukung dengan inventarisasi daftar dan peta kekayaan desa, menerapkan praktik demokrasi deliberatif untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa oleh Bumdes. Keberadaan peta untuk memperkuat status desa adalah Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Imigrasi (Kemedes PDTT) Tahun 2015. Peraturan tersebut mengatur jenis-jenis kewenangan desa untuk pembangunan daerah dan ekonomi desa. Berdasarkan peraturan tersebut, harus ada efek sinergis antara pedoman pemerintah provinsi, lokal, dan desa dalam mengembangkan peta jalan ekonomi daerah desa melalui Bumdes.

Salah satu desa wisata yang berada di kawasan Borobudur adalah Desa Ngargogondo yang terletak di barisan Pegunungan Menoreh tepatnya 3 kilometer arah tenggara Objek Wisata Candi Borobudur. Penetapan desa Ngargogondo sebagai desa wisata berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Desa Wisata pada tanggal 18 Maret 2021.

Masyarakat desa Ngargogondo yang bekerja di bidang pertanian juga menunjukkan potensi untuk membentuk atau mendirikan BUMDes yang mengelola hasil pertanian masyarakat desa Ngargogondo seperti slondok, emping mlinjo, pembibitan durian montong dan tokong, krombong anyam

bambu, serta cinderamata anyam keping yang diperjualbelikan di lokasi wisata Candi Borobudur. Adapun potensi wisata yang dimiliki desa ini antara lain Desa Bahasa dan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan perangkat pemerintah desa dan perwakilan pelaku usaha di wilayah desa Ngargogondo, permasalahan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya sinergitas antara pemerintah desa, masyarakat desa, pelaku usaha, dan BUMDes dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa. Kerja sama yang kurang baik antara pemerintah desa, masyarakat desa, pelaku usaha, dan BUMDes terlihat dari kurangnya program pelatihan dan pengembangan bagi masyarakat dalam hal pengelolaan usaha, terlihat jelas persaingan antara pelaku usaha dan BUMDes dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi yang tepat, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kemuncuran dari berbagai usaha yang sudah berkembang di desa.

Mengenai persaingan usaha yang baik tertera pada al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 29, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemerintah desa perlu meningkatkan tata kelola BUMDes yang didukung dengan pemetaan potensi yang dimiliki desa. Hal tersebut mendorong kami untuk

melakukan pelatihan dan pendampingan dalam rangka optimalisasi fungsi BUMDes melalui penguatan manajemen. Harapan dengan adanya pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan motivasi personal pengelola BUMDes serta mengoptimalkan fungsi BUMDes melalui perbaikan tata kelola BUMDes dalam mengembangkan potensi ekonomi berdasarkan kekayaan lokal yang dimiliki desa. Kedepannya, BUMDes diharapkan benar-benar menjadi lembaga sosial sekaligus lembaga komersial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ngargogondo. Di samping itu, permasalahan yang dihadapi mitra antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran dan motivasi pengelola BUMDes;
- b. Lemahnya manajemen pengelolaan BUMDes ;
- c. Kegiatan usaha BUMDes tidak inovatif dan cenderung pasif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka melalui Program Kemitraan Masyarakat ini akan dilakukan 4 (empat) upaya sebagai solusi yaitu:

1. Penguatan Motivasi Pengelola BUMDes;
2. Pelatihan Administrasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Pelatihan Inovasi Kegiatan Usaha dan Merancang *Business Plan*;
4. Monitoring dan Evaluasi.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini didukung oleh beberapa metode, yaitu:

1. Metode observasi, dengan menggali informasi mengenai potensi dan permasalahan yang terjadi di desa

- Ngargogondo secara umum dan BUMDes Ngargogondo.
2. Ceramah dan diskusi, dengan memberikan gambaran secara lebih mendetail dan menyeluruh tentang pentingnya penguatan manajemen BUMDes dalam rangka optimalisasi fungsi BUMDes bagi pengembangan potensi desa Ngargogondo. Dalam kegiatan penyuluhan ini, mitra akan diberikan informasi mengenai rancangan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BUMDes agar dapat berperan secara aktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
 3. Praktik Lapangan (Praktik Langsung), yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya
 - a. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas permasalahan yang terjadi dan umpan balik berupa pemberian solusi. Pelaksanaan FGD dilakukan oleh tim pengabdian yang melibatkan pemerintah desa, pengusaha dan pengelola BUMDes desa Ngargogondo untuk bersama-sama melakukan diskusi mengenai pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha yang telah berkembang di desa.
 - b. Mempelajari hal-hal dasar mengenai BUMDes, seperti cara menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, administrasi kegiatan, dan administrasi keuangan.
 - c. Pelatihan untuk menyusun SOP yang mudah dipahami dan diimplementasikan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pelaporan.

- d. Pelatihan inovasi kegiatan usaha dilaksanakan untuk meningkatkan potensi usaha (produk/jasa) yang dapat dilaksanakan oleh BUMDes.
 - e. Pelatihan cara merancang *business plan* yang baik termasuk di dalamnya adalah cara menghitung harga pokok produksi dan produksi yang efisien dalam menghasilkan keuntungan.
4. Pengawasan dan evaluasi, yang dilakukan selama berjalannya pelatihan. Tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen dan dibantu beberapa mahasiswa.

Tabel 1 di bawah ini menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan ke					
		1	2	3	4	5	6
1.	Analisis Situasi (persiapan pengabdian dan survei awal)						
2.	Sosialisasi dan diskusi						
3.	Pelatihan						
4.	Monitoring dan evaluasi						
5.	Penyusunan laporan						

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober 2021 di desa Ngargogondo, Borobudur, Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang dua orang narasumber, yaitu:

1. Bambang Haryanto yang memberikan materi tentang manajemen BUMDes.
2. Budi Hartono S.E., M.Si., yang memberikan materi tentang pengelolaan produk BUMDes.

Kegiatan pelayanan ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pengelola BUMDes. Hal ini karena bahasan pengabdian ini yaitu terkait dengan penyusunan anggaran, SOP dan *business plan* untuk membuat inovasi sesuai dengan kebutuhan peningkatan pemahaman pembukuan keuangan BUMDes di desa Ngargogondo.

Dari agenda tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes masih membutuhkan informasi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan tentang pengelolaan organisasi yang baik khususnya di BUMD. Sejauh ini, para manajer sangat bergantung pada catatan yang sangat terbatas dan sederhana, seperti melacak uang yang mereka keluarkan, tetapi banyak yang masih mengandalkan selebar kertas. Ketika mereka mulai mengumpulkan banyak uang, Anda memindahkan catatan Anda ke buku yang lebih besar. Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan, pengurus dapat menjelaskan bahwa dirinya sudah paham tentang pengelolaan BUMDes yang prima. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Organisasi harus memiliki struktur organisasi yang menggambarkan wilayah

kerja yang mencakup seluruh organisasi. Ini mencakup pola hubungan kerja antar bagian (bimbingan, nasihat, dan akuntabilitas) (Kusumastuti, 2021). Cara penerapan konsep ini adalah pengelola BUMDes dapat membuat uraian tugas untuk memperjelas peran masing-masing individu atau departemen. Hal ini menghilangkan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang *incumbent* serta memungkinkan terjadinya duplikasi seluruh jabatan/jabatan yang terdapat di BUMD. Selain itu, pengelola BUMDes sangat menyadari bahwa sistem koordinasi yang terpenting ada pada pemerintah desa, khususnya walikota setempat. Bagaimanapun, walikota adalah salah satu pendorong utama keberhasilan kinerja BUMDes.

2. AD/ART wajib hadir sebagai acuan kegiatan organisasi, karena organisasi harus memiliki pedoman kerja yang jelas. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait dengan transaksi penjualan yang saling menguntungkan atau transaksi tabungan dan margin.
3. Organisasi yang baik perlu memperhatikan kesejahteraan pengelola organisasi agar pengelola organisasi dapat mengembangkan sistem penggajian dan pengupahan yang sesuai dalam kegiatan ini. Sistem penggajian dan kompensasi ini adalah salah satu alat untuk memotivasi para manajer untuk segera mencapai tujuan kinerja organisasi mereka.
4. Otoritas publik harus mengutamakan transparansi akuntabilitas atas pencapaiannya dan kegiatan lainnya. Sistem ini akan semakin memperjelas keberadaan BUMD dan membangun

kepercayaan masyarakat bahwa BUMD adalah sarana ekonomi desa yang dapat meningkatkan dan mensejahterakan kemandirian desa.

5. Membuat rencana bisnis yang jelas dan terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rencana bisnis ini juga memuat ide-ide kreatif dan inovatif yang relevan dengan keadaan masyarakat sekitar saat ini. Tentu saja, ide ini dapat mengubah kekayaan lokal menjadi barang bisnis yang menguntungkan. Rencana ini akan berfungsi sebagai panduan yang jelas tentang apa yang harus Anda lakukan sekarang atau di masa depan. Rencana ini juga berfungsi sebagai acuan untuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek, termasuk metrik kinerja yang mewakili tujuan untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Pengelola BUMDes dapat melakukan perhitungan bisnis yang menguntungkan, sehingga mereka menyadari bahwa profitabilitas bukan satu-satunya ukuran profitabilitas bisnis. Kinerja unit bisnis juga melihat bagaimana aspek penjualan keuangan dilihat dalam arus kas, yang ditunjukkan dalam laporan yang jelas. Memang jika tingkat pengembalian tercapai, tetapi arus kas masih merah, bisnis tersebut tidak terlalu menguntungkan karena bisnis masih memiliki banyak biaya operasional. Mungkin tingkat pengembalian harus meningkat bahkan untuk penjualan besar, dan sebaliknya. Artinya, tingkat pengembalian cenderung tetap atau bahkan menurun.
7. Membuat laporan administrasi dan akuntansi dalam format sederhana yang mudah dipahami tetapi dapat

memberikan informasi yang jelas sesuai kebutuhan. Laporan pengelolaan yang jelas berarti keabsahan informasi tertulis tentang kegiatan BUMD yang dapat menjelaskannya. Selain itu, dapat dengan mudah ditemukan dan tersedia bagi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.

Perubahan yang terjadi pada mitra setelah dilakukan kegiatan ini terlihat dari segi pengetahuan peserta yang sebelumnya tidak tahu tentang akuntansi BUMDes dan SOP BUMDes. Setelah kegiatan ini, peserta sudah tahu tentang akuntansi BUMDes dan SOP BUMDes, bukan hanya pengetahuan tentang akuntansi, peserta juga telah memiliki pengetahuan tentang inovasi dan bagaimana cara merancang business plan yang baik termasuk di dalamnya adalah cara menghitung harga pokok produksi dan produksi yang efisien dalam menghasilkan keuntungan bagi BUMDes. Dilihat dari sisi keterampilan, para peserta sudah tahu membukukan kas masuk dan kas keluar, mencatat penjualan dan pembelian dan pengetahuan ini diperoleh setelah peserta mengikuti kegiatan ini.

Berdasarkan hasil kegiatan PKM tersebut, terlihat bahwa warga masyarakat desa Ngargomukti sangat bersemangat dalam belajar dan menuntut ilmu demi menambah pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai hadis Ibnu Majah yang menyatakan bahwa: *"Rasulullah SAW bersabda: menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim"*.

Beberapa faktor pendukung kegiatan PKM ini terlaksana dengan lancar adalah antusias dari peserta selama kegiatan. Akan tetapi, selain faktor pendukung, terdapat berapa faktor yang membatasi kegiatan. Faktor-faktor yang membatasi keberhasilan acara tersebut meliputi: (1) Waktu yang

terbatas, dan (2) Keterbatasan alat-alat penunjang kegiatan, seperti proyektor untuk presentasi, alat peraga, wifi dan audio.

Kesimpulan

Kegiatan FGD dilaksanakan secara efektif dalam rangka peningkatan motivasi dan komitmen para pengelola BUMDes Ngargomukti. Dengan demikian, kedepannya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pengelola BUMDes dengan perangkat desa.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola BUMDes Ngargomukti untuk memenuhi kewajiban administrasi, menyusun SOP sebagai pedoman kegiatan, melakukan inovasi kegiatan usaha, serta menyusun rancangan *business plan* (perencanaan usaha) yang baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terprogram dan berkelanjutan secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran dan kontinuitas dalam penguatan manajemen dan optimalisasi fungsi BUMDes Ngargomukti dalam mengembangkan potensi ekonomi desa Ngargogondo.

Adapun saran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: Kegiatan pendampingan kurang berjalan maksimal karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pemerintah terkait pandemi Covid-19 di wilayah pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDes Ngargomukti memerlukan pendampingan yang lebih intensif dengan alokasi waktu yang lebih panjang. Hal ini disebabkan karena pergantian perangkat desa, sehingga diperlukan waktu yang lebih

panjang untuk adaptasi dan terbentuknya sinergitas antara perangkat desa yang baru dengan pengelola BUMDes Ngargomukti dalam mengoptimalkan potensi desa Wisata Ngargogondo.

Referensi

- Ainiyah, Nur, Rubiyanto, dan Diah. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pengelola Bumdes dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa di Desa Pungging Mojokerto. *Abdimas Nusantara* Vol.2 No.1, Juli 2020.
- Dhesinta Rini, W. S., & Tarigan, M. I. (2020). Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh Bumdes di Desa Belik. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.22219/Janayu.V1i1.11481>
- Kusumastuti, D. K. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Pelatihan Evaluasi dan Perencanaan Keuangan Sehat Berbasis Syariah pada Pengusaha Muslim Skala Mikro Kecil di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.24090/Sjp.V1i1.5136>
- Dhesinta Rini, W. S., & Tarigan, M. I. (2020). Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh Bumdes di Desa Belik. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.22219/Janayu.V1i1.11481>
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45-55.

- Suwito, R., & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 4(1), 88-101. doi: <https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.31319>
- Vibriyanti, D. (2020). Kesehatan Mental Masyarakat: Mengelola Kecemasan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 29(2), 69. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.550>
- Wibisono, A. F. (2020). Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi dan Manajemen Organisasi sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1>